

IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI PEKANBARU TAHUN 2012

Oleh : Aspri Anti

Aspriantinainggolan@yahoo.co.id

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusly SD,M.Si

**Program Studi Administrasi Publik
Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Panam Jl. Hr. Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-632277**

ABSTRACT

Indonesian government step in addressing issues of educational equity, namely the launching of 9-Year Compulsory Education Program set forth in Government Regulation No. 47 of 2008 on compulsory education. One of the problems facing the city of Pekanbaru in 2012 in the field of education that is not maximal implementation of the 9-year compulsory education program. Therefore the Government Pekanbaru required to pay attention to children of school age is 7-15 years to follow the 9-year compulsory education program. The main problem that often arises in the success of compulsory nine-year program is to ensure that children who have graduated from primary school to continue their education through programs to level junior or package B. All school-age children can enjoy education if the educational facilities available. This condition cannot be separated from Pekanbaru city government in facilitating the participation of educational facilities.

This study aims to determine the Implementation of Compulsory 9 Year In Pekanbaru In 2012 and examine the factors that affect the implementation of 9-year compulsory education program in Pekanbaru In the Year 2012.

From the results of research and analysis concluded that the implementation of the 9-year compulsory education program can be seen from each of the indicators of the study variables namely: 1 standards and targets. 2. Resources. 3. communication between organizations. 4. Characteristics of the implementing agency. 5. Social and economic conditions. 6. Disposition. Factors

that affect the implementation of 9-year compulsory education program, namely 1. Human resources, 2. Fund, 3. Facility

Keywords: implementation, program, Compulsory 9 year 2012

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Langkah pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pemerataan pendidikan, yaitu dengan pencanangan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,

Perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin meningkat, membuat Kota Pekanbaru semakin padat dan sarat dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan di pendidikan yaitu belum maksimalnya pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Oleh sebab itu Pemerintah Pekanbaru dituntut untuk memperhatikan anak-anak usia sekolah yaitu 7-15 tahun untuk mengikuti Program Wajib Belajar 9 Tahun. Program Wajib Belajar ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun

baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama (SMP) atau yang sederajat.

Pada tahun 2012 jumlah siswa yang berusia 7-15 tahun di Kota Pekanbaru berjumlah 141.546 siswa, yang terdiri dari 104.402 siswa SD dan 37.144 Siswa SMP. Sedangkan jumlah bangunan Sekolah SD 274 Sekolah dengan jumlah kelas 2.532 kelas yang terdiri dari kelas baik berjumlah 2.075 kelas dan Kelas Rusak berjumlah 547 kelas dan jumlah bangunan sekolah SMP berjumlah 114 sekolah memiliki 1.320 kelas yang terdiri dari kelas baik berjumlah 1.183 dan kelas rusak berjumlah 137 kelas.. (Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru).

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan penunjang yang menjadi persyaratan terselenggaranya pendidikan yang baik. Namun kenyataannya masih terbatas hal ini dapat dilihat dari Kurangnya ruang kelas belajar untuk murid mengakibatkan jumlah murid dalam satu kelas melebihi standar yang ditetapkan tugas pokok wajib belajar yaitu 36 siswa SD dan 32 siswa SMP.

Tabel I.I
Jumlah Usia Sekolah Dan Putus Sekolah Di Tingkat SD dan SMP

No	Kecamatan	Jumlah murid Tahun 2012		Angka anak putus sekolah Tahun 2012	
		SD	SMP	SD	SMP
1	Tampan	14.492	2.465	13	3
2	Bukit raya	9.242	2.806	1	15
3	Limah puluh	7.339	5.030	4	2
4	Sail	3.415	2.461	0	0
5	Pekanbaru kota	4.475	532	4	6
6	Sukajadi	7.995	4.250	2	12
7	Senapelan	6.233	3.626	0	22
8	Rumbai	6.518	1.826	21	4
9	Tenayan raya	11.159	3.381	18	12
10	Marpoyan damai	15.242	3785	6	10

11	Rumbai pesisir	8.672	4.011	6	19
12	Payung sekaki	9.620	2.941	7	3
13	Jumlah	104.402	37.114	82	108

Pada kenyataanya masih adanya anak di Pekanbaru usia sekolah yang belum mengeyan pendidikan, padahal dengan adanya program wajib belajar sembilan tahun didukung dana APBD Kota Pekanbaru tahun 2012 berjumlah Rp. 382.432.699.930.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI PEKANBARU TAHUN 2012**

A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kota Pekanbaru ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kota Pekanbaru ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penilitin

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun Di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mengimplementasikan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
- b. Sebagai bahan masukan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama

- c. Dapat menambah wawasan penulis dalam mengimplementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun yang merupakan cakupan dari bidang ilmu administrasi negara.

C. Konsep Teori

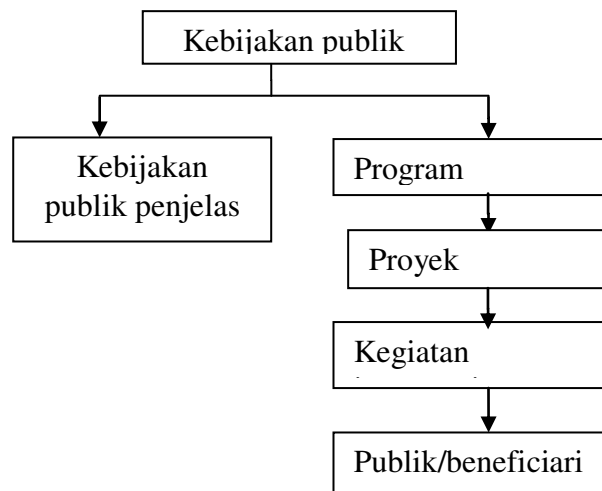
1. Kebijakan Publik

Budi Winarno (2002:14)

mengatakan bahwa secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjukan perilaku aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengerian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik, oleh karena itu dibutuhkan batasan konsep kebijakaan publik yang lebih tepat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Definisi lain dari implementasi kebijakan juga di jelaskan oleh **Nugroho (2011:618)** implementasi kebijakan prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplentasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



Implementasi Kebijakan (Sumber: Rian Nugroho 2011)

Memahami dan meneliti implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah memahami dan meneliti apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan diformulasi di tetapkan. Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan usaha untuk menimbulkan dampak pada masyarakat seperti yang diungkapkan **Mazmania dan Sabatier dalam Muhammad Afrizal (2012:13)**

Kemudian dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini dikenal dengan beberapa model antara lain :

a. Model Donald Van Meter dan Van Horn

Ada enam variabel menurut van meter dan horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi
4. Karakteristik Agen Pelaksana.
5. Kondisi Sosial Ekonomi
6. Disposisi

3. Program

Programa adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dengan program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu
3. Adanya aturan-aturan yang dipegang dan prosedur yang harus dilalui
4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan **(Jones, 1994:296).**

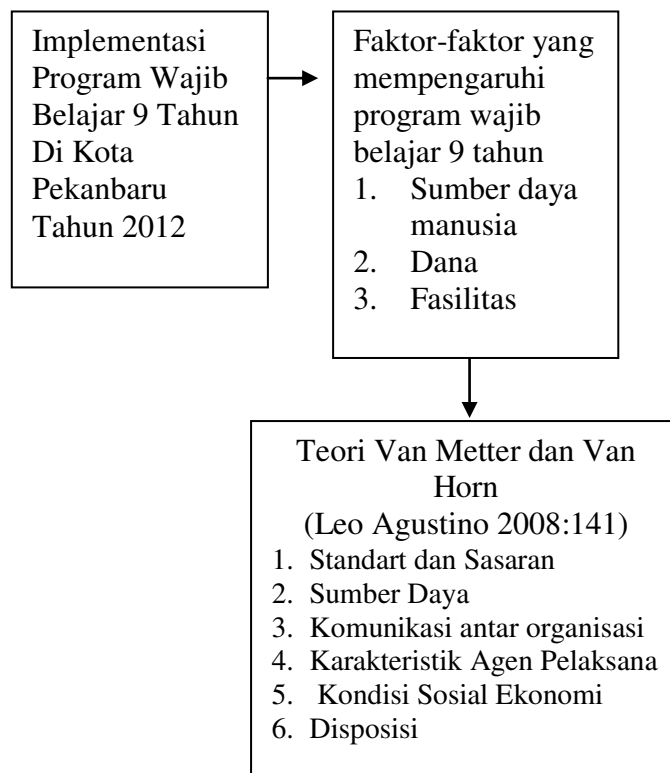
4. Wajib Belajar Sembilan Tahun

Program wajib belajar Wajib belajar adalah program pendidikan

minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Program wajib belajar ini bertujuan untuk meningkatkan akses pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau melalui jalur formal maupun jalur non formal yang

mencakup Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau sederajat (Dinas Pendidikan Pekanbaru 2010).

D. Kerangka Berfikir



E. Konsep Oprasinoal

Agar tidak terjadi salah pengertian atau untuk memberikan kesamaan pandangan dan memudahkan menganalisa serta membatasi ruang lingkup penelitian, maka disini penulis mengemukakan konsep oprasional sebagai berikut:

1. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
2. Kebijakan Wajib Belajar

3. Implementasi program wajib belajar sembilan tahun di pekanbaru 2012
4. Program

F. Metode penelitian

1. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi lokasi penelitian dilakukan dilingkup Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Dengan alasan karena instansi tersebut yang menangani Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

2. Informan Penelitian

Dalam penelitian

ini peneliti menggunakan informan penelitian melalui *key informan*. Dalam menentukan informan selanjutnya ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* Merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan yang ahli dibidangnya. Adapun informan susulan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut

1. Kepala Sub Bagian Penyusun Program
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Kepala Bidang Pendidikan SMP
4. Kepala Sekolah SD dan SMP
5. Guru
6. Masyarakat Pekanbaru/ Anak Putus Sekolah

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

- a. Data primer
- b. Data sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

G. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan molyong melalui beberapa tahap analisis yaitu :

- A. Reduksi data
- B. Interpretasi data
- C. Interpretasi data
- D. Pengambilan keputusan dan verifikasi

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang

pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

2. Wilayah Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar

5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa

3. Profil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

Kedudukan dinas pendidikan kota pekanbaru berdasarkan peraturan walikota nomor 17 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi dinas pendidikan dilingkungan pemerintah kota pekanbaru.

Merupakan unsur pelaksana pemerintah kota pekanbaru dibidang pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan sesuai kewenangan pemerintah serta peraturan.

Perundang-undangan yang berlaku Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dinas pendidikan kota pekanbaru mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidikan dan pengajaran tingkat dasar,

menengah, kejuruan, pendidikan anak usia dini, pendidikan formal dan non formal..

- b. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dan pengajaran tingkat dasar, menengah, kejuruan, pendidikan anak usia dini, pendidikan formal dan informal, dan kesenian di tingkat sekolah..
- c. Pembinaan pendirian dan penyelenggaraan sekolah tingkat dasar, menengah, kejuruan, pendidikan anak usia dini, pendidikan formal dan non formal..
- d. Pengaturan dan pengawasan penerimaan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, uang sekolah, ijazah dan perpustakaan sekolah.

3. Sumber Daya Dinas Pendidikan

Jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 1386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) orang yang terdiri:

- a. Status Pegawai Negri Sipil (PNS) :220 Orang
- b. Status Pegawai Honorer : 42 orang
- c. Status Guru Tidak Tetap (GTT) : 523 orang
- d. Status Guru Bantu (GB) : 601 orang

Secara lengkap kondisi aparatur Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru digambar sebagai berikut :

4. Tingkat Pendidikan Personil

Tingkat Pendidikan personil/pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Kondisi Personil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
Menurut Tingkat Pendidikan pada Akhir tahun 2012

No	Tingkat pendidikan formal	PNS	Honor	Guru tidak tetap	Guru bantu	Jumlah	Persen (%)
1	SD/Sederajat	1	1	0	0	2	0,14
2	SMP/Sederajat	5	2	0	0	7	0,51
3	SMA/Sederajat	44	21	38	0	98	7,07
4	Akademi/Sarmud	7	2	111	138	258	18,61
5	S1	128	16	369	425	960	69,26
6	S2	38	0	10	11	59	4,26
7	S3	2	0	0	0	2	0,14
	Total	220	42	523	601	1386	100

Sumber : Dinas Pendidikan Pekanbaru

- a. Pangkat/Golongan Personil**
 Kondisi kepangkatan/golongan pegawai Dinas Pendidikan Kota

Pekanbaru posisi akhir tahun 2012, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Kondisi Personil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Menurut Pangkat/Golongan Pada Akhir Tahun 2012

No	Golongan /Pangkat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pembina Utama Madia (IV/d)	0	0
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	0,91
3	Pembina Tk.I (IV/b)	28	12,73
4	Pembina (IV/b)	95	43,18
5	Penata Tk.I(III/d)	22	10,00
6	Penata (III/c)	16	7,27
7	Penata Muda Tk.I(III/b)	21	9,55
8	Penata Muda (III/a)	19	8,64
9	Pengatur Tk.I (II/d)	3	1,36
10	Pengatur (II/a)	7	3,18
11	Pengatur Muda Tk.I(II/b)	3	1,36
12	Pengatur Muda (II/a)	4	1,82
	Jumlah PNS	220	100,00
13	Honorar (Non Golongan)	42	3,60
14	Guru Tidak Tetap (GTT)	525	44,85
15	Guru Bantu (GB)	601	51,54
	Jumlah Non PNS	1166	100,00
	TOTAL	1386	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

1. IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kemampuan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala kegiatannya sesuai dengan peraturan pemerintah no 47 tahun 2008 dan sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan prinsip peraturan pemerintah yang benar dan sesuai dengan standar profesional .Namun dalam proses implementasian program wajib belajar 9 tahun itu sendiri banyak terdapat kendala seperti peraturan pemerintah yang belum mempunyai sanksi kepada masyarakat yang tidak mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan juga kesadaraan masyarakat. Namun dalam peraturan pemerintah ini hanya bersifat himbauan saja kepada masyarakat kota pekanbaru, belum ada sanksi kepada masyarakat kota pekanbaru yang anaknya tidak mengikuti program wajib belajar 9 tahn ini.

Program wajib belajar dilaksanakan dengan maksimal dengan

memberikan bantuan yaitu bagi mayarakat yang menjadi peserta didik diberikan dana bantuan BSM (bantuan siswa miskin) setiap tahunnya tetapi kenyataanya masi ada anak yang tidak mengeyam pendidikan. Hal ini dapat kita lihat di setiap persimpangan lampu merah serta pasar-pasar yang berada dipekanbaru terdapat anak yang usia sekolah yang bekerja sebagai pegamen, penjual koran serta kuli panggul. Sebagian besar anak yang putus sekolah ini dikarenakan masih banyaknya siswa-siswa yang perekonomian orang tuanya yang belum mampu dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap arti pentingnya nilai pendidikan kepada anaknya.

B. Sumber Daya.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan program wajib belajar adalah Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan juga Guru. untuk melaksanakan tugas-tugas program wajib belajar 9 tahun. Berikut adalah tabel jumlah guru perkecamatan di kota pekanbaru :

Tabel 3.1
Jumlah Guru Perkecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Guru SD	Guru SMP
1	Tampan	477	121
2	Payung sekaki	238	50
3	Bukit raya	401	44
4	Marpoyan damai	487	243
5	Tenayan raya	549	215
6	Lima puluh	330	309
7	Sail	160	66
8	Pekanbaru kota	72	0
9	Sukajadi	358	154
10	Senapelan	361	151
11	Rumbai	288	100

12	Rumbai pesisir	382	136
13	Jumlah	4103	1589

Sumber dinas pendidikan kota pekanbaru

Dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yaitu guru dan jumlah guru tersebut sudah mencukupi dan dalam melaksanakan program wajib belajar dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasi dengan baik. Namun dalam melaksanakan program ini masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan juga masih

banyak guru yang belum memiliki sertifikasi

Program wajib belajar 9 tahun ini bertujuan untuk meningkatkan akses pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau melalui jalur formal dan informal. Program ini membebaskan biaya bagi peserta didik yang bersifat menyeluruh yang mana dananya berasal dari APBN dan APBD.

Tabel 3.I
Jumlah Dana Program Wajib Belajar 9 Tahun Menurut Sumber SD dan SMP
Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Tahun 2012

No	Tingkatan sekolah	Dana menurut sumber			
		P.pusat	Pemprov	Pemkot	Jumlah
1	SD	Rp45.528.468.647	Rp10.952.55.3321	Rp39.683.240..314	Rp96,164.262.282
2	SMP	Rp11.870.194.125	Rp298.550.750	Rp14.498.318.674	RP324,919262799
3	Jumlah				Rp421,083525081

Sumber: dinas pendidikan kota pekanbaru

Dana yang dialokasikan untuk melaksanakan program wajib belajar 9 tahun masih kurang untuk melaksanakan suatu kebijakan diperlukannya dana yang mencukupi agar program dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga tujuan dari program dapat tercapai.

Selain sumber daya manusia dan tersedianya dana untuk melaksanakan program wajib belajar 9 tahun ini diperlukan juga adanya fasilitas yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan program. Dalam melaksanakan program wajib belajar fasilitas sekolah sudah memadai untuk kelancaran proses belajar mengajar dalam implementasi program wajib

belajar 9 tahun, namun hal ini berbeda menurut kepala sekolah fasilitas sekolah belum memadai untuk proses belajar mengajar,

fasilitas di sekolah tersebut belum memadai untuk menjalankan program wajib belajar 9 tahun masih banyak fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan proses belajar mengajar yang masih minim, seperti komputer, alat-alat laboratorium dan juga buku-buku sekolah minimnya alat-alat ini mengakibatkan proses belajar mengajar di sekolah tidak berjalan dengan baik.

C. Komunikasi antar Organisasi

Dalam melakukan komunikasi mengenai penyelenggara program wajib belajar 9 tahun pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat dikatakan berjalan dengan baik, yang mana dalam hal ini dengan adanya pertemuan setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa pihak dinas pendidikan dan sekolah-sekolah dipekanbaru sangat merespon dengan baik mengenai kelancaran penyelenggaraan program wajib belajar 9 tahun ini. Agar pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ini dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat maka Pemerintah harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program wajib belajar 9 tahun ini .

sosialisasi dalam penelitian ini merupakan cara pihak pemerintah kepada masyarakat untuk menyampaikan semua informasi-informasi tentang program wajib belajar 9 tahun. Sosialisai dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun merupakan sangat penting karena program ini diperuntukan kepada masyarakat usia 7-15 tahun. Jadi tanpa adanya sosialisasi yang baik maka ini akan mempengaruhi maksimalnya pencapaian tujuan dari program wajib belajar 9 tahun yang telah di tetapkan ini. Dinas pendidikan menyerahkan masalah sosialisasi program wajib belajar 9 tahun kepada pihak-pihak sekolah, agar sekolah melakukan pertemuan dengan pihak orang tua murid untuk menyampaikan tentang tujuan program wajib belajar 9 tahun ini. Namun dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan program wajib belajar 9 tahun terdapat kendala.

Komunikasi yang dilakukan antara guru dan orangtua murid tidak berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya partisipasi orang tua dalam

menghadiri pertemuan sekolah untuk membahas program wajib belajar 9 tahun..Kehadiran masyarakat dalam komunikasi yang dilakukan pihak sekolah menyebabkan komunikasi yang dilakukan pihak sekolah tidak berjaan dengan lancar karena kurangnya partisipasi masyarakat.

D. Karakteristik Agen Pelaksana

Sekolah sebagai lembaga pendidikan pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan program wajib belakajar 9 tahun, mendapat perintah langsung dari dinas pendidikan, setiap tindak tanduk sekolah saat melaksanakan program wajib belajar 9 tahun atas arahan dinas pendidikan dan persetujuan kasubag program. Sekolah sebagai lembaga pendidikan pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan program wajib belakajar 9 tahun, mendapat perintah langsung dari dinas pendidikan, setiap tindak tanduk sekolah saat melaksanakan program wajib belajar 9 tahun atas arahan dinas pendidikan dan persetujuan kasubag program. mekanisme yang dilakukan oleh sekolah dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, melakukan dengan prosedur yang diberikan oleh dinas pendidikan namun dalam melaksanakan program sekolah tidak punya kebijakan untuk anak yang tiba-tiba putus sekolah.

E. Kondisi sosial dan ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat meliputi kepemilikan kebendaan, pendapatan dan pesediaan hidup, sedangkan status sosial meliputi keharmonisan rumah tangga, dan pendidikan orang tua. Kondisi sosial ekonomi tersebut akan mempengaruhi pola pikir dan sikap orang tua terhadap

pendidikan ana. Orang tua yang memiliki ekonomi lemah pola pikir dan sikapnya hanya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan pendidikan anak bukan prioritas utama. Bagaimana mungkin mereka menyekolahkan anaknya sementara kesulitan hidup yang dihadapi melilitnya.

Kondisi ekonomi orang tua sangat berpengaruh terhadap partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya, walaupun pihak pemerintah telah memberikan bantuan dengan membebaskan biaya pendidikan untuk anak usia SD dan SMP, namun sebagian masyarakat tidak bisa memanfaatkan bantuan tersebut karena anak mereka harus membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka hal ini disebabkan karena randahnya pandangan orang tua tentang mamfaat pendidikan bagi anaknya.

Demikian pula dengan konsidi sosial orangtua, status sosial dan pendidikan orang tua sangat memperngaruhi terhadap pendidikan anaknya orangtua yang rendah pendidikanya akan memandang bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang penting. Pandangan yang penting baginya adalah bahwa hidup seseorang yang paling penting adalah mampu mencari nafkah dan kekayaan. kondisi ekonomi dan sosial sangat berpengaruh dalam implementasi program wajib belajar 9 tahun. Hal ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan faktor ekonomi orang tua dan pemahaman oranng tua terhadap pentingnnya pendidian mempengaruhi akan partisiasipasi orang tua terhadap pendidikan.

F. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan implementor untuk melaksanakan kebijakan public, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, insensitas disposisi implementor yaitu prefrensi yang dimiliki. Dalam melaksanakan program wajib belajar ini arah petugas untuk menerima atau menolak mengimplementasikan program wajib belajar 9 tahun, maka dirasa perlu mengetahui persepsi implemetor mengenai persoalan-persoalan terhadap kebijakan ini.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui respon Kepala Bidang Pendidikan Menengah dapat dikatakan mendukung adanya program wajib belajar 9 tahun beliau merasa sangat senang dan tidak merasa keberatan dengan program wajib belajar ini. Karna dengan adanya program wajib belajar 9 tahun ini sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas.

1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DIPEKANBARU TAHUN 2012

A. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh sebab itu dalam implemetasi suatu kebijakan diperlukanya sumber daya manusia yang berkualitas agar program tersebut dapat diimplementasi dengan efektif dan juga efisien. Namun pada kenyataanya dalam implementasi program wajib belajar 9 tahun ini sumber daya manusia masi belum

mencukupi. Kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan program wajib belajar tidak terlaksana dengan baik. Apabila sumber daya manusia tercukupi dalam implementasi program wajib belajar ini, maka program ini dapat terlaksana dengan tuntas dengan demikian semua anak usia 7-15 tahun dapat mengeyam pendidikan.

1. Dana

Program ini membebaskan biaya bagi peserta didik yang bersifat menyeluruh yang mana dananya berasal dari APBN dan APBD, namun dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dana yang diperoleh oleh dinas pendidikan belum mencukupi untuk melaksanakan program wajib belajar hal ini dikarenakan banyak siswa yang memerlukan beasiswa untuk mengeyam pendidikan namun dana yang dimiliki dinas pendidikan juga masih kurang. Dana ini juga digunakan untuk membangun dan juga menyediakan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah.

2. Fasilitas

Fasilitas juga pendukung dalam implementasi program wajib belajar 9 tahun. Untuk melaksanakan program wajib belajar 9 tahun ini diperlukannya fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti tersedianya ruang kelas yang memadai untuk menampung jumlah siswa setiap tahunnya, mempunyai sarana prasarana sekolah seperti laboratorium, perpustakaan dan komputer namun masih banyak juga sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Masih banyak fasilitas yang kurang untuk pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sehingga dalam proses belajar mengajar ketepatan waktu untuk menyelesaikan satu mata pelajaran menjadi lama. Hal ini disebabkan fasilitas yang tidak memadai mengakibatkan murid menunggu untuk

dapat bergantian menggunakan alat-alat seperti alat laboratorium maupun komputer.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan sebelumnya itu mengenai implementasi program wajib belajar 9 tahun di kota pekanbaru tahun 2012 maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi program wajib belajar 9 tahun di pekanbaru pada tahun 2012 adalah standar dan tujuan, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi dan disposisi,
2. Faktor dominan yang mempengaruhi implementasi program wajib belajar 9 tahun di pekanbaru tahun 2012 yaitu faktor standar dan tujuan, dan juga faktor ekonomi dan sosial

B. Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar program wajib belajar dapat di implementasi dengan maksimal maka pemerintah pekanbaru harus memiliki peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang tujuan program wajib belajar dan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tidak melaksanakannya.
2. Sebelum melaksanakan program wajib belajar pemerintah dan pihak sekolah harus menempatkan guru

- sesuai dengan kualifikasi latar belakang pendidikannya, selain itu hendaknya pemerintah harus menyediakan dana yang cukup dan juga fasilitas pendukung sehingga program wajib belajar 9 tahun ini dapat berjalan dengan baik
3. Agar program wajib belajar 9 tahun dapat terselenggara sesuai dengan tujuannya, hendaknya pihak pemerintah dan sekolah lebih meningkatkan komunikasi dengan pihak masyarakat guna terselenggaranya sosialisasi yang baik dengan masyarakat dan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya program sekolah paket a,b dan c. Untuk yang putus sekolah. Sehingga tidak ada lagi terlihat anak yang tidak mengenyam pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono. Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publick*. Alfabeta. Bandung
- Daliyo. 2004. *Pekerja Anak dan Perencanaan Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dunn N William. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Hadinata Graha Widya. Yogyakarta.
- Indiahono. Dwianto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic PolicyAanaliys*. Gaya Media. Yogyakarta.
- Nugroho Riant 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugro Riant. 2004. *Kebijakn publik*. Gramedia. Jakarta.
- Nugroho Riant. 2011. *Public Polcy*. Gramedia. Jakarta.
- Parsons. Wayne. 2005. *Public Policy*. Jakarta : Rajawali Press.
- Purwanto.
- Agus Erwan danSulistiyastuty. Dyah Ratih. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Ramly. Nadjamuddin. 2005. *Pembangunan Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*. Grafindo. Jakarta.
- Subarson. 2009. *Analisis Kebijakan Public*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sujianto. 2008. *implementasi kebijakan publik*. Alaf Riau. Pekanbaru.
- Syaukani. 2008. *Kebijakan Publik : Menanggapi Masyarakat Madani, Media Pustaka*. Yokyakarta .Tangkilisan
- Hassel Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transfarmasi Pikiran Nagel*. Balairung & co. Yokyakarta.
- Winarno. Budi.2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Perssindo. Yokyakart.
- Winarno. Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yokyakarta: Media Perssindo.
- Afrizal, Muhammad,2012, *faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Dikecamatan Rumbal*. Pekanbaru: Library universitas Riau
- Astrid, Purba 2013, *Implementasi Peraturan Perah No 14 Tahun*

*2006 Tentang Restribusi Izin Usaha
Perdagangan Minuman
Beralkohol Dikota
Pekanbaru.Pekanbaru.*

SUMBER LAIN :

Undang-Undang 1945 pasal 31
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Indonesia No 47
Tentang Wajib Belajar.
Inpres No.5 Tahun 2006 Tentang
Gerakan Percepatan Penuntasan
Wajib Belajar 9 Tahun.